

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di Palu, Sulawesi Tengah : Kebijakan Publik untuk Membangun SDM Unggul

Filzah Irshadi¹, Julia Ivanna²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: Filzahirshadins@gmail.com¹, juliaivanna@unimed.ac.id²

Abstrak

Tulisan artikel ini membahas tentang analisis kebijakan publik untuk meningkatkan akses maupun kualitas pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yg unggul dan mampu bersaing dalam skala nasional, Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berarti penggunaan kajian literatur berupa jurnal maupun buku sebagai dukungannya, selain itu penulis ini menggunakan teknik observasi dan wawancara mendukung penulisan artikel ini. Kebijakan publik yang efektif harus komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak di Palu.

Kata kunci: *Pendidikan, Pemerintah, Kualitas*

Abstract

Article writing This article discusses the analysis of public policies to improve access and quality of education to build superior human resources and be able to compete on a national scale. quality of education to build superior human resources and be able to compete on a national scale, local governments need to allocate an adequate budget to build adequate education infrastructure. The writing of this article uses a qualitative descriptive method, which means the use of a qualitative descriptive method. The writing of this article uses a qualitative descriptive method, which means the use of literature studies in the form of journals and books as support. This article uses a qualitative descriptive method, which means the use of literature reviews in the form of journals and books as support, besides that the author This author uses observation and interview techniques to support the writing of this article. Effective public policy effective public policy must be comprehensive and sustainable, involving the active participation of active participation of various stakeholders. Local governments, schools, teachers, parents and communities need to work together to

realize quality and equitable education for all children in Palu. quality and equitable education for all children in Palu.

Keywords: *Education, Government, Quality*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Kota Palu, Sulawesi Tengah, masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bencana alam gempa bumi dan tsunami tahun 2018 telah memperparah beberapa tantangan yaitu Gempa bumi dan tsunami menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur pendidikan di Palu, seperti sekolah, gedung perkantoran, dan rumah guru. Hal ini mengakibatkan kekurangan ruang belajar, terhambatnya proses belajar mengajar, dan berkurangnya motivasi belajar siswa. Dampak itu membuat semua infrastruktur dan segala kegiatan mengajar sempat terhambat apalagi Di era globalisasi yang semakin kompetitif, peningkatan kualitas pendidikan menjadi sebuah keharusan bagi setiap wilayah, termasuk Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan kekayaan budaya yang beragam, Palu memiliki peluang besar untuk mencetak SDM berkualitas yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Masalah-masalah seperti keterbatasan akses pendidikan, kualitas pengajaran yang belum memadai, dan minimnya fasilitas pendukung masih menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Palu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif dan efisien. Kebijakan publik yang baik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Akses terhadap pendidikan yang terjangkau dan berkualitas harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap anak di Palu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi atau geografis.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, mulai dari gedung sekolah hingga fasilitas penunjang lainnya. Selain akses, kualitas pendidikan juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman perlu diterapkan, serta diimbangi dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Program-program pelatihan dan sertifikasi bagi para guru harus menjadi prioritas, sehingga mereka dapat mengajar dengan metode yang efektif dan *up-to-date*. Kebijakan publik yang baik juga harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dan inklusi dalam pendidikan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyediaan akses pendidikan, baik berdasarkan gender, latar belakang sosial ekonomi, maupun kebutuhan khusus. Fasilitas dan program pendidikan inklusif harus ditingkatkan, sehingga setiap anak dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal tanpa adanya hambatan. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Palu. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung program-program

pendidikan, seperti penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi, pelatihan keterampilan, ataupun magang di industri-industri lokal.

Dalam implementasi kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap langkah dan program yang dijalankan dapat diawasi dan dievaluasi secara terbuka oleh masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, dan organisasi masyarakat sipil, akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan kebijakan publik yang tepat sasaran dan terintegrasi, Kota Palu dapat mengembangkan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan global. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan akan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi muda yang berpendidikan, terampil, dan berdaya saing, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun masa depan Palu yang lebih cerah dan berkelanjutan. Pendidikan merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat bangsa bagi seluruh masyarakat, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat internasional. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat sejahtera. Pendidikan merupakan suatu hal yang berharga dan penting bagi lembaga pendidikan di Indonesia.

Kurikulum pendidikan yang ada di semua lembaga pendidikan pada dasarnya adalah tentang bagaimana membimbing peserta didik menjadi warga negara yang mampu mengungkapkan nilai-nilai yang baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam bidang pendidikan di daerah seperti, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat menyebabkan terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan. Penggunaan metode lama, peralihan ke yang baru, teknologi digunakan untuk meningkatkan mutu, guna mempercepat peningkatan mutu pendidikan, banyak pegawai yang tidak memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, dan tidak hanya itu, sulit untuk menjamin bahwa materi pendidikan memahami metode pengajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan. Otonomi pendidikan juga harus didukung oleh pendapatan utama daerah; Semakin banyak dana yang ada di daerah, maka semakin banyak pula kegiatan yang bisa dikembangkan, termasuk di bidang pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 1945 dan 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang baik. Ada tiga pilar yang saling berhubungan erat dan harus bersinergi dalam pembangunan daerah sebagai strategi pembangunan nasional: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi.

Suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi akan berkembang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Terkadang kita tidak bisa mencegah perubahan dan perkembangan. Perubahan di zaman modern menuntut kita untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan tersebut agar tidak ketinggalan. Untuk menyikapi dinamika dan perubahan zaman modern, lembaga pendidikan juga harus terlibat dalam manajemen perubahan. Untuk itu, dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan terkini agar produksi pendidikan dapat merespon perubahan secara efektif. Sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penciptaan dan pengembangan sumber daya manusia juga perlu mengikuti perubahan tersebut. Dalam konteks ini, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kualitas pendidikan di semua jenjang dan

departemen pendidikan. Pendidikan menjadi penting karena pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional yang menentukan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standardisasi dan profesionalisme saat ini terus dilakukan dan memerlukan konsensus dari berbagai pihak mengenai perubahan yang terjadi di berbagai bagian sistem pendidikan. Peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam kebijakan pendidikan menekankan pada peralihan dari pemerintahan pusat (pemerintahan tertinggi) ke pemerintahan daerah yang berbasis pada pemerintahan kota dan kabupaten (pemerintahan daerah). Oleh karena itu, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, khususnya sekolah dasar dan menengah, berada di pundak pemerintah daerah yang berada di pemerintah kota dan kabupaten, sehingga pelaksanaannya akan menjadi warna kemauan politik pemerintah daerah. peraturan daerah (Perda). Pengambil keputusan dalam hal ini tentu saja bupati/walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan direktur serta pegawai Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah mereka, namun hal ini tidak selalu terjadi, karena perbedaan praktik dan salah tafsir terhadap kebijakan yang telah ditetapkan menyebabkan berbagai kebingungan. dan berkurangnya kualitas. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, keberhasilan pendidikan dan kegagalan di sekolah terutama bergantung pada guru, kepala sekolah, dan pengawas, karena ketiga tokoh inilah yang menjadi kunci yang menentukan dan mengarahkan banyak bidang sekolah lainnya. Pada titik ini, kelebihan dan kekurangan departemen lain di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah, dan administrator, tanpa mengurangi pentingnya staf pengajar lainnya. Implementasi proses desentralisasi mengharuskan para pemimpin dan pengelola untuk memajukan sekolah yang berkualitas dan produktif dengan otonomi dan tanggung jawab penuh. Sistem pendidikan Indonesia saat ini berada dalam tekanan serius, dengan banyak kasus yang terjadi di seluruh negeri. Permasalahan pendidikan di Indonesia semakin kompleks dan semakin bertambah jumlah dan kompleksitasnya. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, seperti program nasional dan terutama peningkatan kapasitas guru, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi Indonesia adalah kualitas pendidikan di semua tingkat dan departemen pendidikan. melalui tender. . penyediaan buku dan bahan pelajaran, penyediaan dan peningkatan bahan dan prasarana, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun beberapa indikator mutu pendidikan belum menunjukkan banyak perbaikan. Beberapa sekolah, terutama di wilayah perkotaan, menunjukkan peningkatan positif dalam kualitas pendidikan, namun ada pula yang masih memprihatinkan. dari segi akses untuk menuju kesekolah

Di era Society 5.0, masyarakat harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan komprehensif; pendidikan dengan demikian menjadi pusat peran perubahan dan masyarakat mendorong untuk menciptakan komunitas belajar dan mendorong pembelajaran. Gunakan berbagai alat pembelajaran teknologi dan pengetahuan dan kembangkan kurikulum global. Pemahaman terhadap permasalahan tersebut menjadikan kebijakan pendidikan sebagai landasan dalam

memberikan penjelasan dan petunjuk untuk diterima dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan. Produktivitas pendidikan tidak hanya muncul dalam bentuk lulusan saja, namun juga pada kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitas, efisiensi, produktifitas, efisiensi, inovasi, kehidupan kerja yang sehat dan kerja yang baik, serta kinerja sekolah dari kegiatan/perilaku sekolah. Khusus mengenai mutu kinerja sekolah, prestasi sekolah dapat dikatakan bermutu apabila kinerja sekolah, khususnya kinerja peserta didiknya, menunjukkan keberhasilan yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, nilai ujian keseluruhan, ujian akhir, skor, studi ilmiah, kompetisi akademik; dan (2) prestasi non akademik seperti IMTAQ, kejujuran, etika, sportivitas, seni, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kualitas sekolah bergantung pada berbagai tahapan kegiatan (proses), seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Prestasi guru dikatakan bermutu apabila mampu menyampaikan pelajaran dengan baik dan mendidiksi siswa berprestasi yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Keunggulan akademik tercermin dari nilai yang diraih siswa. Keunggulan yang luar biasa juga tercermin dari keberagaman ilmu yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti program unggulan. Adapun rumusan masalah yang di angkat kedalam tulisan yaitu

1. Apa faktor penyebab masih rendahnya mutu pembelajaran siswa dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan mempunyai kualitas yang tinggi di palu ?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan proses rekrutmen serta pengembangan guru dan pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tinggi?
3. Bagaimana pemerintah daerah memudahkan akses transportasi yang kurang memadai untuk siswa dan siswi yang bersekolah?
4. bagaimana cara sumber daya manusia di kota palu mampu bersaing di era society5.0?

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dan deskriptif digunakan dalam metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman orang dan/atau kelompok tentang iman, kesakitan, penderitaan, keindahan, harapan, dan hal-hal yang biasa dilakukan dan dialami orang dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif, disebut juga metodologi kualitatif (Bogdan dan Tylor, 1975: 5), adalah suatu metode penelitian di mana informasi deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan diamati dan perilaku diamati. Bagi mereka, cara ini mengacu pada lingkungan dan orangnya (semuanya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan Dan Langkah Langkah Memangun Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Di Kota Palu

Alasan kualitas pendidikan di Indonesia terutama di kota palu untuk mengumpulkan penyebab rendahnya tingkat pendidikan di sekolah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi

kualitas pendidikan kita. Di bawah ini juga akan kami jelaskan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia

1) kualitas rendah Dalam hal fasilitas fisik, misalnya, banyak gedung sekolah dasar yang rusak, ketersediaan dan penggunaan lingkungan belajar terbatas, dan buku-buku perpustakaan hilang. Sementara laboratorium yang belum terorganisir, pemanfaatan teknologi informasi yang belum memadai, dan sebagainya. Bahkan masih memiliki gedung sendiri, perpustakaan, laboratorium, dll. Masih banyak sekolah yang tidak melakukannya.

2) Kualitas guru rendah Situasi guru di Indonesia juga cukup memprihatinkan. Sebagian besar guru belum mempunyai keterampilan yang memadai untuk memenuhi tugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, memberikan bimbingan, mengajar, melakukan penelitian, dan melakukan kerja masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tak hanya itu, beberapa guru Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Meskipun guru dan dosen bukanlah satu-satunya pihak yang menentukan keberhasilan dalam pendidikan, namun yang terpenting dalam pendidikan dan kualifikasi adalah mengajar. Sebagai indikator mutu, dosen berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Rendahnya kualitas guru dan pembina juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3) Kesejahteraan guru Rendahnya status sosial guru berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Karena penghasilan yang tidak mencukupi, banyak guru yang terpaksa bekerja lembur. Mengajar di sekolah lain, memberi pelajaran sore, tukang ojek, penjual mie rebus, toko buku/LKS, penjual pulsa, dan lain-lain. Ada orang-orang yang. Ketimpangan kondisi kehidupan guru swasta dan negeri juga merupakan masalah lain. disorot. Isu-isu sosial masih sulit untuk dicapai pada tingkat yang tepat dalam lingkungan privat.

4) Distribusi kesempatan pendidikan yang tidak merata Kesempatan belajar masih terbatas pada tingkat dasar. Statistik

Sementara itu, kesempatan pendidikan anak usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan dalam mendidik sejak usia dini tentu akan menghambat perkembangan dunia kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan tindakan gender yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesenjangan.

5) Kebutuhan pelatihan tidak mencukupi Hal ini terlihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut studi penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan negara tersebut, sekitar 3 juta anak putus sekolah setiap tahunnya dan mengalami masalah pekerjaan karena kurangnya literasi kesehatan. Kesenjangan antara kebutuhan pendidikan dan bisnis ini disebabkan oleh kurikulum yang memuat materi yang kurang relevan dengan ilmu yang dibutuhkan siswa ketika memasuki dunia kerja. 6) Tingginya biaya pendidikan Pendidikan berkualitas itu mahal. Kalimat ini sering kali seolah-olah menunjukkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan orang untuk mendapatkan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) membuat masyarakat miskin tidak punya pilihan selain bersekolah. Masyarakat miskin tidak perlu bersekolah. Pendidikan yang berkualitas tidak bisa murah, tidak pula murah atau gratis. Namun pertanyaannya adalah: siapa yang harus

membayarnya? Padahal, merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara mempunyai akses terhadap pendidikan dan masyarakat kelas bawah mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun kenyataannya pemerintah ingin menyangkal tanggung jawab. Namun rendahnya pendapatan tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk 'cuci tangan'.

Membangun sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas tinggi di Palu memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan saat ini, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menyusun rencana strategis jangka panjang yang mencakup prioritas, target, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Palu. Salah satu aspek penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Tadulako untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru yang sudah mengajar maupun calon guru baru. Program ini harus dirancang untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam bidang pedagogik, penguasaan materi, dan pengelolaan kelas yang efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem remunerasi dan insentif bagi guru agar dapat menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas. Kurikulum pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di abad ke-21. Kurikulum yang relevan, terpadu, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda Palu dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pakar pendidikan, industri, dan masyarakat untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Infrastruktur pendidikan yang memadai juga merupakan faktor penting dalam membangun sistem pendidikan yang efektif. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membangun atau merenovasi gedung sekolah, menyediakan fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang lengkap, serta mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil dan pelosok di Palu juga mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas.

Membuat Regulasi Kriteria Kepada Calon Guru Yang Berkualitas

Pemerintah Kota Palu menyadari pentingnya tenaga pengajar yang mumpuni dan mumpuni untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda. Oleh karena itu, mereka telah mengambil langkah-langkah efektif dalam perekrutan dan pengembangan guru dan pendidik di bidang ini. Proses ini bertujuan untuk menjaring orang-orang terbaik yang memiliki keterampilan dan kemampuan tinggi pada bidang pendidikan. Langkah pertama dalam proses rekrutmen adalah menentukan kriteria seleksi. Hal ini mencakup kualifikasi yang dibutuhkan seperti gelar sarjana atau magister di bidang pendidikan dari universitas, serta pengalaman mengajar. Selain itu, calon guru juga harus

menunjukkan kemampuannya dalam mengelola kelas, berkomunikasi secara efektif, dan menggunakan metode pengajaran yang inovatif. Setelah kriteria seleksi ditentukan, proses rekrutmen dilanjutkan dengan rencana pemasaran. Hal ini termasuk iklan pekerjaan di surat kabar dan saluran, serta mengunjungi universitas dan lembaga pendidikan untuk mencari lulusan yang tepat. Pemerintah juga memberikan lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan kesempatan belajar di sektor pendidikan di Palu. Calon guru yang lolos putaran pertama kemudian mengikuti serangkaian tes dan wawancara yang dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Meskipun ujian tertulis mencakup informasi tentang kurikulum, metode pengajaran dan manajemen sekolah, wawancara dilakukan untuk mengetahui keinginan, tujuan, dan komitmen guru masa depan terhadap profesi guru. Calon guru yang berhasil dalam proses rekrutmen akan mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan terkini di bidang pendidikan dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di berbagai ruang kelas. Program pengembangan guru meliputi pelatihan metode pengajaran inovatif, pengelolaan kelas yang efektif, penggunaan teknologi pendidikan, dan strategi pengajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, guru dibekali dengan pengetahuan tentang kurikulum terkini dan kebijakan pendidikan yang relevan. Untuk memastikan para guru dapat terus mengembangkan keterampilan mereka, pemerintah juga menawarkan program pendidikan berkelanjutan dan kesempatan untuk menghadiri lokakarya, seminar, dan konferensi. Hal ini memungkinkan guru untuk tetap mendapatkan informasi terkini di bidang pendidikan dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik mereka dengan rekan kerja. Dengan rekrutmen yang konsisten dan rencana pengembangan yang menyeluruh, Pemerintah Kota Palu berharap dapat melahirkan kader guru dan tenaga pendidik yang memiliki keterampilan dan kemampuan tinggi. Hal ini akan memastikan bahwa kaum muda di kawasan ini menerima pendidikan berkualitas, yang akan memungkinkan mereka menjadi warga negara yang produktif di negara dan memainkan peran penting dalam masyarakat.

Universitas Tadulako sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sulawesi Tengah memegang peranan penting dalam mendidik tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) universitas ini menawarkan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan calon guru menjadi guru yang berkualitas di bidangnya. Kurikulum komprehensif mencakup materi pelajaran, pedagogi dan pengembangan karakter, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam profesi guru. Salah satu poin penting dari program pelatihan calon guru di Universitas Tadulako adalah penguatan praktik pengajaran langsung di sekolah mitra. Program Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi kelas kehidupan nyata. Selama mengajar, mereka dibimbing oleh guru berpengalaman yang memberikan feedback dan evaluasi kepada untuk meningkatkan keterampilan mengajarnya. Universitas Tadulako juga mengutamakan pengembangan penelitian dan inovasi di bidang pendidikan. Anggota fakultas FKIP melakukan penelitian ekstensif mengenai metode pengajaran, kurikulum dan masalah pendidikan lainnya. Hasil penelitian ini akan dimasukkan dalam penelitian agar calon guru dapat memperoleh informasi terkini dan mempelajari praktik terbaik dalam dunia pendidikan. Siswa juga

didorong untuk melakukan penelitian dan mengembangkan solusi baru untuk mengatasi tantangan pendidikan. Universitas Tadulako berkomitmen untuk menghasilkan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas, hal ini tercermin dari upayanya menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain baik lokal maupun nasional. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman dan sumber daya yang dapat meningkatkan program persiapan guru. Universitas juga menyelenggarakan lokakarya, kursus pelatihan dan seminar agar para pengajar yang ada dapat terus meningkatkan keterampilannya dan mengikuti perkembangan terkini di bidang pendidikan.

Langkah Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Fasilitas Transportasi Yang Memadai

Akses transportasi yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Namun, di beberapa wilayah di Palu, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan sarana transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa dan siswi. Kesulitan ini dapat menyebabkan tingkat absensi yang tinggi, keterlambatan, dan bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menyediakan layanan bus sekolah gratis atau bersubsidi. Bus-bus ini dapat beroperasi di rute-rute yang menghubungkan daerah pemukiman padat penduduk dengan sekolah-sekolah terdekat. Selain memudahkan akses transportasi, bus sekolah juga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan siswa selama perjalanan ke dan dari sekolah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan operator bus lokal atau mengalokasikan anggaran khusus untuk mengadakan armada bus sekolah sendiri. Untuk wilayah-wilayah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau oleh bus, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan angkutan alternatif seperti angkutan desa atau kendaraan roda dua yang dioperasikan oleh masyarakat setempat. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pengemudi dan memastikan kendaraan tersebut memenuhi standar keselamatan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau subsidi bahan bakar untuk menurunkan biaya operasional angkutan ini. Selain menyediakan sarana transportasi langsung, pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengembangkan program pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, siswa yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses materi pelajaran dan berinteraksi dengan guru tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Program ini dapat menjadi solusi sementara bagi siswa yang menghadapi kendala transportasi, sebelum akses fisik ke sekolah dapat ditingkatkan.

Paragraf 5: Dalam upaya memudahkan akses transportasi untuk siswa, pemerintah daerah juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan orang tua. Mereka dapat membentuk komite atau kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan transportasi di wilayah masing-masing dan mengusulkan solusi yang sesuai. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi program transportasi yang dijalankan oleh pemerintah, untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa.

Cara Sumber Daya Manusia Di Kota Palu Mampu Bersaing Di Era Society5.0

Era Society 5.0 merupakan babak baru dalam perkembangan masyarakat yang ditandai dengan integrasi yang lebih besar antara dunia dan dunia maya, serta penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan big data. Untuk bersaing pada periode ini, para pekerja di Kota Palu perlu melakukan persiapan dengan mempersiapkan peralatan dan kemampuan yang diperlukan. Salah satu kunci daya saing di era Society 5.0 adalah teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Pemerintah Kota Palu harus meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur di seluruh wilayah dan mendorong literasi teknologi sejak usia dini. Pendidikan formal dan nonformal harus mengintegrasikan kurikulum yang mengajarkan keterampilan penggunaan perangkat lunak, aplikasi dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pekerja di kota Palu perlu meningkatkan pengetahuan TIK serta keterampilan berpikir kritis, kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Era Society 5.0 membutuhkan orang-orang yang mampu berinovasi, menganalisis data, dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendidikan harus menekankan pembelajaran aktif, proyek kolaboratif, dan pendekatan berbasis masalah untuk mengembangkan keterampilan ini. Kemampuan beradaptasi dan belajar sepanjang hidup juga menjadi syarat penting di era Society 5.0. Pemerintah Kota Palu dapat mendorong budaya belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan, kursus online, dan gelar profesi yang mudah diakses oleh semua kalangan. Di era Society 5.0, kolaborasi dan keterampilan manusia juga menjadi semakin penting. Pegawai di Kota Palu harus mampu bekerja dalam tim yang berbeda, baik secara fisik maupun informal, serta berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Pelatihan harus menekankan pembelajaran kolaboratif, presentasi, diskusi, dan keterampilan kepemimpinan. Kami menghadapi persaingan global di perusahaan. 0, Pekerja di Kota Palu juga harus berakal sehat dan berbudaya. Mereka harus mampu beradaptasi dengan budaya dan budaya yang berbeda serta berkomunikasi secara efektif dengan mitra internasional. Pemerintah Kota Palu dapat mempromosikan program pertukaran pelajar, beasiswa belajar ke luar negeri, dan pendidikan bahasa asing untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan tersebut. Selain mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang relevan, pegawai di Kota Palu juga harus memiliki sikap mental dan jiwa kewirausahaan yang baik. Periode keluarga 5. 0 akan menciptakan peluang bisnis dan model ekonomi baru yang membutuhkan masyarakat yang berani mengambil risiko, berpikir out of the box, dan memiliki jiwa wirausaha. Melalui rencanabisnisnya, Pemerintah Kota Palu dapat menstimulasi lingkungan wirausaha, menyediakan pembiayaan, dan mendukung startup di wilayah tersebut. Terakhir, upaya mempersiapkan pegawai Kota Palu bersaing di era Society 5.0 harus mencakup kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan anggaran yang mendukung pengembangan tenaga kerja, sementara lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan industri untuk memastikan program dan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam penguatan budaya belajar di Kota Palu dan mendukung kegiatan yang akan mengembangkan tenaga kerja.

SIMPULAN

Palu, Sulawesi Tengah, menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Bencana alam gempa bumi dan tsunami tahun 2018, kesenjangan akses antara wilayah dan kelompok kaya-miskin, dan kualitas pendidikan yang masih rendah menjadi faktor utama penghambat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan kebijakan publik untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta membangun SDM unggul di Palu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting:

- Perluasan akses pendidikan: Membangun infrastruktur sekolah di daerah terpencil, menyediakan program pendidikan alternatif, dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin.
- Peningkatan kualitas pendidikan: Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pengurangan kesenjangan akses pendidikan: Menerapkan kebijakan afirmatif bagi kelompok marginal, seperti beasiswa dan program khusus.
- Pengembangan keterampilan abad ke-21: Memfokuskan pendidikan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Kebijakan publik yang efektif harus komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak di Palu. Dengan akses dan kualitas pendidikan yang baik, diharapkan dapat menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing di era globalisasi dan berkontribusi pada pembangunan daerah dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44.
- Elynawati, N. U. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Kusnandi. (2017). Konsep Dasar Dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal Of Education Management And Administration Review*.
- Muhammad Ramadhan Raga R, A. T. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.
- Nasir, N., & Sukmawati, S. (2023). *Analysis of Research Data Quantitative and Qualitative. Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 368-373.
- Prastiko, M. N., & Supriyanto, A. (2020). Analisis kebijakan publik dan kebijakan pendidikan. In *Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19*.
- Ritma Hendra, F. (2023). KEBIJAKAN Desentralisasi Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 144-145.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Journal Of Islamic Education*.

- Sari, D. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. *INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Suriono, Z. (2021). Analisis SWOT Dalam Identifikasi Mutu Pendidikan. *ALACRITY : Journal Of Education*.
- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan implementasi manajemen pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 15(1), 51-66.